

**KUALITAS LAPORAN KEUANGAN: PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
(Studi Kementerian Perhubungan BPTD Kelas II Provinsi Gorontalo)

**Marten Puyo**

Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo  
marten.puyo@unisan.ac.id

**Abstract**

*Improving the quality of financial reports can be done by consistently applying public sector accounting standards and conducting regular audits of financial reports. The aim of the research is to determine and analyze the role of the quality of financial reports in moderating the application of public sector accounting reporting standards on the accountability of government agency performance. The research method approach used is a quantitative research method with the type of analysis used is survey analysis, using the PLS-SEM (partial least square modeling) analysis tool. The sample in the research was financial report managers, namely 46 respondents. Based on the results of this research, firstly, the implementation of public sector accounting has a positive and significant effect on the accountability of government agency performance. Second, the quality of financial reports cannot moderate the application of public sector accounting to the accountability of government agency performance. The higher the quality of the financial reports, the greater the possibility that the financial reports can meet the information needs of stakeholders*

*Keywords Implementation of Public Sector Accounting, Quality of Financial Reports, and Accountability of Government Agency Performance*

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

Kinerja pemerintah daerah sangat penting dalam pemerintahan, dan hal ini dapat dilihat dalam laporan kinerjanya. Sahala Purba et al., (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah pengendalian pada aparatur pemerintah terhadap segala aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintahan, hal ini dilakukan karena pemerintah berperan sebagai agen penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan kepada publik atau masyarakat yang disebut sebagai prinsipal. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, terdapat beberapa hal telah menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja masih dapat dikatakan lemah, dan untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum secara maksimal dapat diimplementasikan secara konsistensi dan nyata dijalankan. Kelamahan tersebut diantaranya, kurang adanya komitmen dalam mengedepankan tingkat akuntabilitas yang di lihat dari sisi kinerjanya pemerintah, sehingga akuntabilitas atas kinerja tersebut belum mendapatkan perhatian penuh, utamanya pada tingkatan kementerian, lembaga serta pada tingkatan untuk Pemerintah Daerah.

Melihat kelemahan pada hasil evaluasi MENPAN tersebut, maka hal ini harus didukung oleh standar pelaporan akuntansi sektor publik. Menurut Peilouw et al. (2023) bahwa akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi, dalam hal ini instansi pemerintah perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Demikian pula menurut Wina (2014) bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang baik oleh instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Sebagaimana hasil riset mengatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dapat memberikan kontribusi ataupun sumbangan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

misalnya dalam hal penyajian suatu informasi dalam pertanggungjawaban yang berkaitan langsung dengan tujuan, fungsi dan serta obyek pengeluaran (Handayani, 2015; Mahsun (2016).

Anto et al. (2022)) menyatakan bahwa semakin meningkatnya implementasi pelaporan akuntansi sektor publik maka akan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga menurutnya bahwa implementasi pelaporan akuntansi sektor publik memberikan efek pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Demikian pula Ikrami (2021) hasil risetnya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dapat memberikan peningkatan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Namun menurut Salamah, et al. (2021) yang menyimpulkan hasil risetnya menyatakan penerapan dari pelaporan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah justru tidak memberikan efek signifikan atau memiliki pengaruh yang negatif.

Inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian tersebut, sehingga kualitas laporan keuangan dapat memberikan kekuatan atau memoderasi hubungan penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Seperti dinyatakan oleh Ridzal (2020) bahwa fundamental dalam mengimplementasikan serta untuk dapat mewujudkan tingkat pertanggungjawaban pada sektor publik yaitu dengan menyusun laporan keuangan sektor publik tersebut. Demikian pula Ridzal (2020) menyatakan bahwa tugas utama pada instansi pemerintah sebagai pengelola keuangan, dan hal tersebut dimana penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini harus sesuai dengan misi serta tidak terlepas dari fungsi serta rencana strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan baha pelaporan keuangan yang terbuka dan tanggungjawab dapat menjadikan suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang bisa dipertanggungjawabkan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
- b. Apakah kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja secara internal dan memberikan pengetahuan pada kerangka kualitas laporan keuangan melalui penerapan akuntansi sektor public, serta sebagai referensi yang relevan pada kajian selajutnya, dengan menambah kebaharuan pada penelitian selanjutnya.

# **B. KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS**

## **1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik**

Halim dan Muhamad (2018:3) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Mengacu pada pernyataan Permadi (2013); Pujanira (2017); Rangkuti (2022) bahwa hal-hal yang menjadi indikator sebagai alat untuk mengukur variabel dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

- a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah
- b. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya
- c. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodic

## 2. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah suatu bentuk dari beberapa karakteristik yang terdapat pada suatu laporan keuangan yang kemudian dijadikan sebagai beberapa indikator, yang dalam hal ini telah diatur di dalam PP No. 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Indikator yang digunakan dalam penelitian mengacu pada PP no. 71 tahun 2010, juga mengacu pada penelitian atau referensi dari Andriani et al. (2019); Rompas & Kindangen (2022) yakni:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

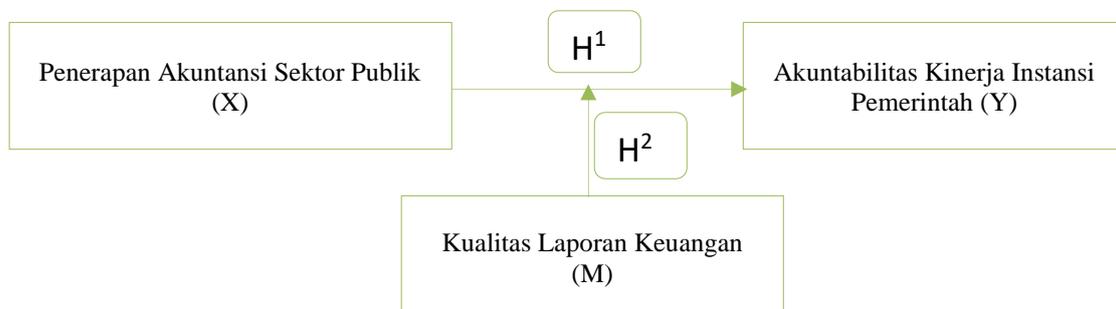
## 3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Administrasi Negara (2003:3) menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah instinya merupakan suatu instrumen yang telah digunakan oleh instansi pemerintah di dalam untuk memenuhi suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan dan atau suatu kegagalan dalam pelaksanaan misi dari sebuah organisasi, yang dalam hal ini terdiri dari berbagai komponen yang kemudian mejadi satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Indikator dalam penelitian ini untuk variabel Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengacu pada Lembaga Administrasi Negara (2003:3), yang mengatakan pencapaian kinerja instansi pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategi
- b. Perencanaan kinerja
- c. Pengukuran kinerja
- d. Pelaporan kinerja

Konsep penelitian disusun secara logis berlandaskan pada teori dan beberapa kajian empiris, yang digambarkan pada kerangka pemikiran berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

#### 4. Hipotesis

##### **Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pembahasan pada penerapan akuntansi sektor publik, lebih tepatnya mendapatkan suatu porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi. Penekanan tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk upaya untuk dapat memajukan sektor publik, yang masih dianggap kurang dilaksanakan secara efisien dan kurang menarik, sehingga terkesan lebih tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang oleh banyak praktisi lebih maju dan efisien. Namun demikian, sekarang ini melalui kalangan praktisi, khususnya pada pemerintah, sudah mulai mendapatkan perhatian yang lebih terhadap suatu penilaian atas kelayakan melalui praktik dari manajemen pemerintahan yang dianggap dapat mencakup keperluan, yang perbaikannya melalui sistem akuntansi manajemen, juga melalui sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Anto et al., 2022)

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik. Laporan yang dibuat kemudian diaudit untuk mengetahui kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. (Rahmawati & Heliana, 2022)

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta sub bagiannya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. (Bastian, 2014). Penerapan akuntansi sektor publik, memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran (Handayani, 2015).

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan berbunyi sebagai berikut:

**H1.** Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

##### **Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan pada Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Laporan keuangan pada umumnya merupakan suatu komponen yang sangat penting pada penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Nasution (2019) mengatakan bahwa kualitas pada laporan keuangan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilaksanakan untuk dapat menjamin suatu pengumpulan terhadap segala penerimaan negara dan penyaluran terhadap pengeluaran – pengeluaran Negara yang tidak menyimpang dari suatu rencana yang telah ditetapkan di dalam anggaran, sehingga maka apabila kinerja akuntabilitas instansi pemerintah dilakukan dengan pengawasan berdasarkan kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara independensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Riset dilakukan (Ridzal, 2020) Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Ruminingsih et al.(2019)) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mudrikah & Ali (2020) bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tetapi penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Demikian pula kualitas laporan keuangan tidak dapat memoderasi hubungan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Putra et al., 2018)

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

**H2.** Kualitas Laporan Keuangan Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, merupakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan jenis penelitian surey. Data analisis menggunakan data statistic. metode ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi pada sikap, perilaku, dan karakteristik dari populasi yang diperoleh melalui sampel dalam populasi (Creswell, 2017:21).

#### 2. Jenis Dan Sumber Data

Data penelitian merupakan primer, merupakan data yang telah didapatkan atau yang telah melalui pengumpulan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan sebagai keperluannya. Data tersebut merupakan data yang dapat telah diperoleh langsung dari data angket, data survei, data observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung kepada responden sebagai pengelola keuangan pada Kementerian Perhubungan BPTD kelas II Provinsi Gorontalo.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah, merupakan keseluruhan jumlah dari pegawai yang terdapat pada lingkungan Kementerian Perhubungan BPTD kelas II Provinsi Gorontalo, sebanyak 250 pegawai, yang terdiri dari ASN dan Honorer atau tenaga kontrak. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah responden yang berhubungan dengan tujuan penelitian yakni pegawai/ honorer/ kontrak sebagai pengelola laporan keuangan pada masing-masing bidang atau divisi di Kementerian Perhubungan BPTD kelas II Provinsi Gorontalo berjumlah 46 responden

#### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data diperoleh langsung dari data angket, data survei, data observasi dan sebagainya yang di ukur dengan skal likert. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis PLS-SEM (*partial least square modeling*). Program yang digunakan adalah SmartPLS 3.0

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengujian Outer Model

Penelitian ini pada batas *loading factor* yang digunakan yakni sebesar 0,7. Setelah dilakukan uji melalui pengolahan data terhadap keseluruhan variabel dan indikator melalui model yang dibangun, dengan menggunakan SmartPLS 3.0, maka hasil *loading factor* dapat ditunjukkan seperti pada tabel 1 berikut:

**Tab. 1. Uji Outer Model**

Variabel	Indikator	Loading Factor	<i>Outer loading</i>	Kesimpulan
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	PASP.1	0.876	0,7	Valid
	PASP.1	0.915		Valid
	PASP.1	0.809		Valid
Kualitas Laporan Keuangan	KLK.1	0.922	0,7	Valid
	KLK.2	0.751		Valid
	KLK.3	0.883		Valid
	KLK.4	0.813		Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AKIP.1	0.892	0,7	Valid
	AKIP.2	0.926		Valid
	AKIP.3	0.844		Valid
	AKIP.4	0.923		Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

**Tabel2. Uji Validitas Diskriminan Menggunakan Akar AVE**

VARIABEL	Validitas Diskriminan Akar AVE
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	0.754
Kualitas Laporan Keuangan)	0.714
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	0.804
X*Modersi	1.000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Hasil uji validitas diskriminan dengan menggunakan nilai akar AVE diperoleh nilai akar AVE lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar variabel laten, sehingga variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kualitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah memenuhi validitas diskriminan.

### **Composite Reliability dan Cronbach's Alpha**

**Tabel 3. Uji Reliability Konstruk**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	0.837	0.901	0.754	Terpenuhi
Kualitas Laporan Keuangan	0.865	0.908	0.714	Terpenuhi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.919	0.943	0.804	Terpenuhi
Batas Nilai	$\geq 0,70$	$\geq 0,70$	$\geq 0,50$	Terpenuhi

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Hasil penelitian pada uji reliabilitas konstruk yang dicapai adalah  $> 0,70$ , maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas yang dilakukan memperkuat hasil dari *composite reliability*.

### **Pengujian Goodness of fit model**

**Tabel 4. Uji Goodness of fit model**

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.104	0.104

Hasil uji goodness of fit model PLS pada Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai SRMR model pada saturated model sebesar 0,076 dan pada estimated model adalah sebesar 0,078. Oleh karena nilai SRMR model baik pada saturated model dan estimated model di bawah 0,08 maka model dinyatakan perfect fit dan layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Akan tetapi dalam kasus ini bahwa nilai SRMR memiliki nilai 0,104, hal ini dapat menunjukkan bahwa model cukup baik sesuai dengan data, meskipun masih ada sejumlah kecil ketidakcocokan antara model dan data yang diobservasi.

### **Pengujian Inner Model (Model Struktural)**

Analisa inner model dapat dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Qsquare test* untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur structural. Hasil pengujian inner model meliputi nilai koefisien determinasi (R-square), dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi**

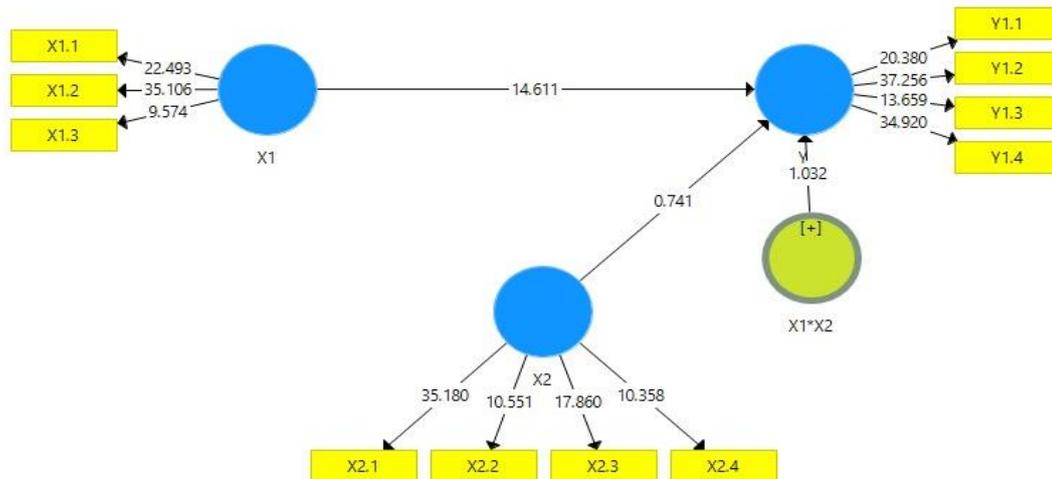
Variabel	R Square	R Square Adjusted
Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	0.870	0.861

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Hasil koefisien determinasi pengaruh antara Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh nilai R square sebesar 0,870 yang artinya pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dijelaskan sebesar 87% oleh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

**Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan hasil estimasi model PLS pada Gambar 1 terlihat bahwa terdapat satu jalur tidak langsung yang memiliki nilai P value < 0,05, sedangkan jalur lainnya memiliki nilai p value < 0,05



Gambar 2. Hasil Analisis Output Model Struktural PLS Algorithm

Hasil pengujian terhadap pengaruh langsung masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6

**Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values	Kesimpulan
PASP -> Ak. Kinerja Instansi Pemerintah	0.983	0.067	14.611	0.000	Diterima
KLK*PASP -> Ak. Kinerja Instansi Pemerintah	0.109	0.105	1.032	0.303	Ditolak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

**Hipotesis Pertama:**

**Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p value dari Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,000 dengan t statistik sebesar 14,611. Oleh karena nilai p value > 0,05 dan t statistik < 1,96 maka Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung, Penerapan standar akuntansi yang dijalankan oleh Kementerian Perhubungan BPTD kelas II Provinsi Gorontalo telah konsisten dan tepat dalam sektor publik, hal ini telah meningkatkan transparansi dan keterbacaan laporan keuangan dan kinerja, konsistensi, dan

instansi pemerintah dapat dengan lebih baik menilai kinerja. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Diterima**.

Sebagaimana pernyataan yang mendukung hasil riset ini, Halim dan Muhammad (2018:3) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik bentuk dari suatu proses kegiatan suatu pengidentifikasian, dan juga membuat pengukuran, dan melakukan pencatatan, serta membuat bentuk pelaporan terhadap transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Juga disamping itu laporan terhadap keuangan pemerintah daerah diperuntukkan sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya bahwa laporan keuangan harus dibuat dan dilaporkan secara periodik untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah secara periodic, dan untuk kepentingan dari laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pengambilan keputusan oleh yang berkepentingan (Utomo et al., 2021; Pujanira, 2017; Zubeir, 2022). Akuntansi sektor publik juga menurut (Handayani, 2015) yang mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran.

Beberapa riset sebelumnya, telah melaraskan hasil temuan dalam penelitian ini, bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik dapat diketahui dari penyusunan laporan keuangan memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran. Dengan kata lain bahwa penerapan akuntansi sector public memberikan dampak pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah (Mahsun, 2016; Peilouw et al., 2023)

#### **Hipotesis Kedua:**

#### **Kualitas Laporan Keuangan Tidak Memoderasi Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p value dari Kualitas Laporan Keuangan untuk memoderasi Penerapan Akuntansi sector public terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,303 dengan t statistik sebesar 1,032. Oleh karena nilai p value > 0,05 dan t statistik < 1,96, maka  $H_0$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan tidak dapat memoderasi atau tidak dapat memperkuat terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan dalam suatu konteks tertentu, Pandangan ini dapat dikatakan bahwa adanya banyak faktor lain lebih mendominasi dalam pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak selalu memoderasi akuntabilitas kinerja, sehingga hal yang penting bahwa kualitas laporan keuangan yang baik masih merupakan faktor yang dapat membantu meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, dan pemahaman pemangku kepentingan tentang kinerja instansi pemerintah Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua Kualitas Laporan Keuangan memoderasi Penerapan Akuntansi sector public terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **Ditolak**.

Hasil tersebut dapat diketahui, penyajian informasi dalam membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya, serta entitas perbandingan penerapan kinerja kebijakan akuntansi lainnya belum dipahami secara menyeluruh oleh pengguna laporan keuangan. Sementara itu, indikator kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, sehingga dengan kurangnya keterkaitan antara laporan keuangan dengan indikator kinerja dapat menyebabkan laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diverifikasi untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Erlina et al. (2015:25), menyatakan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan ukuran dari stakeholder yang akan menilai atau melakukan perincian terhadap suatu hasil yang berasal dari suatu proses pengidentifikasian, dengan melakukan pengukuran, yang kemudian dilakukan pencatatan dan transaksi kegiatan aktivitas ekonomi yang secara langsung

berhubungan dengan transaksi keuangan pada suatu pemerintahan daerah, yang kemudian dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukannya. Dengan demikian bahwa Pernyataan pada Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) merupakan karakteristik dari kualitas laporan keuangan, masih harus dipahami secara menyeluruh, untuk dapat mengukur kualitas laporan keuangan yang tepat dan tersaji dengan benar.

Mudrikah & Ali (2020) kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tetapi penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Demikian pula kualitas laporan keuangan tidak dapat memoderasi hubungan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Mudrikah & Ali, 2020) **Berdasarkan riset hasil penelitian ini, bahwa** kualitas laporan keuangan tidak dapat memoderasi hubungan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena kualitas laporan keuangan merupakan hasil dari penerapan akuntansi sektor publik. Selain itu, kualitas laporan keuangan hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dari kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntansi sektor publik menjadi standar yang harus digunakan pada system pelaporan keuangan yang handal dan dengan memperhatikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaporan keuangan yang tepat. Kebijakan strategi dapat mencapai kinerja yang baik melalui penerapan akuntansi sektor public, sehingga pada saat penerapan akuntansi sektor publik, system pembuatan laporan keuangan menjadi penting. Demikian pula hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan kepada staf instansi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman para pengguna laporan keuangan tentang pentingnya akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan. Memastikan bahwa semua pengguna laporan keuangan memahami bagaimana akuntansi dan pelaporan keuangan berdampak pada akuntabilitas

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anto, H., Alamsyah, S., & Indrawan, A. (2022). Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 19(2), 184. <https://doi.org/10.30651/blc.v19i2.13522>
- Handayani, P. T. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi .... *Maksi Untan*, 12(2), 1–11. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/34730>
- Ikrami, F. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Instansi Pemerintahan (Studi Empiris Pada KEcamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar). *Thesis Faculty of Economy*.
- Mahsun. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi .... *Jurnal Ekonomi, Bisnis ....*, 1(3), 1–21.
- Mudrikah, F., & Ali, K. (2020). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten

Lampung Timur). *Jurnal Fidusia*, 3(2), 166–182. [www.Opsi.id](http://www.Opsi.id),

- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 30–43.
- Nurhani Salamah, Ernadhi Sudarmanto, D. H. (2021). No Title. *JURNAL ONLINE MAHASISWA (JOM) BIDANG AKUNTANSI*, Vol 8(No 3 (2021)). [om.unpak.ac.id](http://om.unpak.ac.id)
- Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 5(1), 111–122. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/9641/pdf>
- Pujanira, P. (2017). *16643-40953-1-Sm. VI*(4).
- Putra, A. P., Akram, A., & Hermanto, H. (2018). Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(2), 271–290. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i2.3942>
- Rahmawati, W. R., & Heliana. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 14–33. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.625>
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>
- Ruminingsih, R., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Atas Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan ...*, 13, 190–207. <https://www.neliti.com/publications/522579/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-efektivitas-penerapan-standar-akuntansi-pemerint>
- Sahala Purba, Rintan Saragih, & Tika Meisiska Br Sembiring. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Utomo, A. C., Suyanto, S., & Riyanto, K. B. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro). *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 2(2), 145–152.
- Wina, I. P. H. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus DispendaProv, Dispenda Kota, Dan Dishub Prov). *Jurnal Riset*, x, 1–15.
- Zubeir, A. (2022). *Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal*.